



## Representasi Maksim Cara dan Relevansi Tuturan Anggota DPRD Kota Makassar

Brillaning Pratiwi<sup>1\*</sup>, Syafruddin<sup>2</sup>, Ratu Badriyah<sup>3</sup>, Arini Noor Izzati<sup>4</sup>, dan Ryzkiah Ridhayanti<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Terbuka

### Info Artikel

#### Article History

Disubmit 14 Desember 2022

Diterima 20 Juli 2023

Diterbitkan 30 Juli 2023

#### Kata Kunci

*prinsip kerja sama, politik, pragmatik, maksim, tuturan*

### Abstrak

Dalam praktik komunikasi politik, bahasa digunakan sangat dinamis dan lentur sesuai dengan konteks, situasi, dan tujuan komunikator. Bahasa di satu pihak mempunyai makna kesepakatan yang terjadi secara sosial dan bebas dari intervensi kekuasaan. Di lain pihak, bahasa mampu menghadirkan diri dan memberi ruang dan sebagai arena untuk berbagai kepentingan dan kekuasaan seperti tuturan dalam percakapan anggota dewan perwakilan rakyat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan maksim cara dan relevansi pada tuturan anggota dewan perwakilan rakyat di kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diambil dari tuturan dalam percakapan anggota dewan perwakilan rakyat di Kota Makassar yang terjadi dalam proses sidang. Data dikumpulkan melalui proses observasi dan rekaman. Teknik analisis data terdiri dari tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Validasi data penelitian dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, serta diskusi dengan teman sejawat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa percakapan dalam ruang sidang DPRD antara anggota dewan dan warga memiliki pelanggaran maksim. pelanggaran maksim yang dominan terjadi pada maksim cara. Pelanggaran maksim relevan yang ditimbulkan dari data menunjukkan kesan pesan atau makna yang ingin disembunyikan. Sedangkan pelanggaran maksim cara muncul disebabkan adanya tanggapan lawan bicara yang ambigu dan adanya sikap yang tidak menunjukkan kesopanan terhadap pernyataan penutur.

### Abstract

*In the practice of political communication, language is used dynamically and flexibly according to the communicator's context, situation, and goals. Language on the one hand has the meaning of an agreement that occurs socially and is free from the intervention of power. On the other hand, language is able to present itself and provide space as an arena for various interests and powers such as utterances in conversations of members of the people's representative assembly. The purpose of this study was to find out the use of the maxim of manner and relevance in the speech of members of the people's representative assembly in the city of Makassar. This study uses a descriptive qualitative approach. The data is taken from the utterances in conversations of members of the people's representative council in Makassar City that occurred during the trial process. Data was collected through the process of observation and recording. Data analysis consists of three stages: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Research data validation was carried out by extending observations, increasing persistence, triangulation, and discussions with colleagues. The results of the study show that conversations in the meeting room between members of the legislature and residents have flouted maxims. The violation of the dominant maxim occurs in the maxim of manner. Violating the relevant maxims arising from the data shows the impression of the message or meaning you want to hide. Meanwhile, the violation of the maxim of manner appears due to the ambiguous response of the interlocutor and the attitude that does not show politeness towards the speaker's statement.*

\* E-mail:

[bpratiwi@ecampus.ut.ac.id](mailto:bpratiwi@ecampus.ut.ac.id)

©2023 The Authors. Published by UNNES. This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

DOI 10.15294/jsi.v12i2.64561

P ISSN: 2252-6315 E-ISSN: 2685-9599

## PENDAHULUAN

Bahasa memainkan peran penting bagi kehidupan manusia dan setiap orang dapat menjalani kehidupan mereka pula karena memiliki dan menguasai bahasa. Selain itu, bahasa juga membantu proses interaksi melalui komunikasi yang baik dan melalui komunikasi bahasa yang dapat dipahami memberikan dampak pada berbagai aktivitas seperti pekerjaan, pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani ataupun menjalankan peran sebagai makhluk sosial. Dengan demikian, bahasa mempengaruhi pembentukan kehidupan sosial dan budaya masyarakat (Sugono, 2014). Komunikasi sangat berpengaruh pada kehidupan manusia. Kegiatan komunikasi bisa mengubah sikap dan tingkah laku seseorang. Alat komunikasi pada saat ini terus berkembang dan membuat pola pikir orang semakin maju (Julianto, 2016). Dengan demikian, bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi sangat erat hubungannya dengan ujaran.

Dari pemahaman tersebut dapat disimpulkan bahwa bahasa sebagai alat komunikasi harus memenuhi unsur-unsur komunikasi agar pesan yang disampaikan dapat dipahami. Seperti yang diungkapkan Widjaja (2010) bahwa proses komunikasi yang baik memiliki unsur-unsur komunikasi yaitu sumber (pembicara), pesan (*message*), saluran (*media*) dan penerima (*receiver, audience*). Ketika unsur-unsur tersebut telah terpenuhi maka pesan yang disampaikan penutur dapat dipahami dan makna bahasa yang terkandung dalam pesan itu juga bisa memiliki kesepahaman dengan maksud dari penutur. Apalagi makna bahasa tidak selalu dipahami secara netral karena bergantung pada perspektif pendengar. Jadi, setiap makna kata, frase kalimat dan paragraf bisa diartikan berbeda baik secara makna literal, makna harfiah, ataupun makna gramatika (Yule, 2016). Oleh karena itu, setiap orang harus memahami tujuan dari percakapan yang dilakukan agar makna pesan yang ingin disampaikan dapat dipahami dengan tepat oleh pendengar.

Namun, seringkali pesan yang disampaikan dalam percakapan tidak tersampaikan dengan tepat karena adanya pelanggaran. Salah satu percakapan yang menarik dikaji adalah praktik komunikasi dalam bidang politik. Hal ini dapat disebabkan karena setiap pesan yang disampaikan oleh para politisi bisa dipahami berbeda oleh para pendengar. Dalam praktik komunikasi politik, bahasa digunakan sangat dinamis dan lentur sesuai konteks, situasi, dan tujuan komunikator. Bahasa di satu pihak mempunyai makna kesepakatan yang terjadi secara sosial dan bebas dari intervensi kekuasaan. Di lain pihak, bahasa mampu

menghadirkan diri dan memberi ruang dan sebagai arena untuk berbagai kepentingan dan kekuasaan itu sendiri (Chaer, 2010). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bahasa sangat efektif untuk menciptakan pengaruh dan sering digunakan sebagai alat politik. Tidak salah apabila terjadi pergantian elite penguasa, selalu mengandung implikasi pergantian bahasa komunikasi politik. Bahasa politik digunakan dalam kaitannya dengan percaturan kekuasaan. Karena itu, bahasa politik tidak selalu dipakai untuk kejernihan makna. Bahasa yang digunakan dimanipulasi untuk kepentingan pemerintah dan elite politik, sehingga terjadi rekayasa bahasa dan memunculkan penyimpangan dari fungsi bahasa, yaitu sebagai alat kerja sama. Jadi, bahasa dalam politik sering memiliki variasi yang menimbulkan makna berbeda (Putrayasa, 2021).

Dari paparan tersebut dapat dipahami bahwa politisi diharapkan mampu berkomunikasi secara lancar kepada berbagai pihak di masyarakat luas. Mereka diharapkan dapat mengkomunikasikan gagasan dan pemikiran mereka secara jelas. Mereka juga diharapkan dapat menanggapi serta memberi respons yang baik terhadap segala masukan, kritik, dan sanggahan terhadap pemikiran maupun kinerja mereka. Mereka juga diharapkan dapat mengungkapkan gagasan mereka dengan sopan dan tidak melukai perasaan lawan tuturnya. Untuk menyatakan secara tepat apa yang dimaksud oleh penuturnya (politisi), maka seseorang harus menggunakan prinsip kerja sama dalam bertutur, yakni (1) maksim kuantitas; (2) maksim kualitas; (3) maksim relevansi; dan (4) maksim cara. Maksim adalah prinsip yang harus ditaati oleh peserta pertuturan dalam berinteraksi, baik secara tekstual maupun interpersonal dalam upaya melancarkan jalannya proses komunikasi (Djajasudarma, 2012). Akan tetapi, setiap orang belum memahami secara konteks konsep prinsip kerja sama.

Padahal seorang politisi menjadi salah satu petutur yang memberikan pengaruh cukup besar kepada masyarakat. Jadi, situasi ini menjadi fenomena menarik untuk diteliti melalui aspek prinsip kerja sama pada tuturan politisi sebagai anggota dewan perwakilan rakyat. Apakah para politisi melakukan pelanggaran prinsip kerja sama dalam tuturannya. Apalagi, setiap orang juga dipengaruhi oleh budaya dan bahasa daerah masing-masing dalam bertutur, seperti anggota dewan di kota Makassar. Hal tersebut berdasarkan penelitian dari Pawito et al. (2020) bahwa kebudayaan berpengaruh terhadap gaya komunikasi. Dengan demikian, pola berbicara seseorang tentunya akan berbeda sesuai dengan karakteristik dari budaya daerah masing-masing. Orang Makassar juga lebih banyak

menggunakan kata kerja dibandingkan kata benda. Masyarakat Kota Makassar dikenal suatu sistem budaya yang menjadi acuan bagi individu dalam kehidupan sosialnya, mulai dari kehidupan keluarga sampai kepada kehidupan yang lebih luas sebagai kelompok etnis, atau kehidupan sosial dalam kerajaan di masa lalu (Melalota, 1995). Di Makassar, suku Bugis menjadi salah satu yang memiliki sifat terbuka dan cenderung menganggap penting beradu pendapat (berargumen) untuk mencapai kesepakatan atau kebenaran. Namun, dalam hubungan ini sifat lugas dan berani lebih tampak di kalangan masyarakat Bugis dibanding masyarakat Minang. Hal tersebut menjadi karakteristik dipilihnya kota Makassar untuk menganalisis prinsip kerja sama dalam tuturan anggota dewan.

Penelitian terdahulu juga masih sedikit yang mengkaji lebih dalam dari penggunaan maksim atau prinsip kerja sama dalam tuturan. Beberapa penelitian terdahulu fokus pada kajian percakapan atau tuturan dalam film atau media massa, seperti pada drama *the importance of being Ernest* (Jafari, 2013), film *Up* yang memberikan banyak informasi dari percakapan karakter menyebabkan banyak pelanggaran maksim (Gustary & Anggraini, 2021). Pada film komedi di Indonesia menunjukkan bahwa alasan pelanggaran maksim adalah untuk menciptakan suasana kompetitif, ramah, kolaboratif dan konflik (Aziz et al., 2019). Selain pada film, acara *talkshow* juga sering melakukan pelanggaran prinsip kerjasama dalam tuturannya, seperti *good morning America talkshow* banyak melakukan pelanggaran maksim kuantitas dan cara karena bertujuan untuk membangun komunikasi yang menyenangkan selama acara berlangsung (Firda et al., 2020; Marlisa & Hidayat, 2020), acara *talkshow* 'Sapa Indonesia Malam di Kompas TV' menunjukkan adanya pelanggaran maksim hubungan dan 50% maksim relasi juga dilanggar (Firda et al., 2021). Bahkan berita juga sering dianggap memiliki prinsip kerjasama dalam proses percakapannya (Kheirabadi & Aghagolzadeh, 2012).

Dari paparan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa banyak penelitian yang mengkaji tentang pelanggaran maksim pada genre sastra seperti film, ataupun acara *talkshow* dan berita. Padahal percakapan yang terjadi dalam sidang anggota DPRD. Jadi, penelitian ini memberikan kerangka berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini dilandasi oleh pemahaman bahwa tuturan (proses komunikasi) anggota DPRD merupakan fenomena kebahasaan yang memiliki makna penting dalam menghasilkan kebijakan. Jadi, jika tuturan mereka banyak tidak dipahami maka bisa menimbulkan kesalahan penafsiran. Dalam proses komunikasi itulah, fenomena kebahasaan berupa penggunaan maksim-maksim tutur. Namun, penelitian ini difokuskan pada kajian pelanggaran maksim cara dan relevansi sesuai dengan asumsi temuan

masalah saat pengamatan proses sidang berlangsung. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kebaruan terkait dengan penggunaan maksim cara dan relevansi yang seharusnya ada ala tuturan anggota dewan.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan maksim cara dan relevansi pada tuturan anggota dewan perwakilan rakyat di kota Makassar. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan manfaat ada pengembangan penelitian tuturan, pengembangan pengetahuan kajian praktik pragmatik. Secara praktis hasil penelitian bisa menjadi masukan bagi setiap orang tentang fenomena (bentuk, fungsi, strategi) para elite politik atau anggota DPRD dan pejabat eksekutif dalam interaksi komunikasi dengan mitra tuturnya.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2019). Penggunaan penelitian kualitatif deskriptif ini berhubungan dengan data tuturan informan atau penutur yang ada di lapangan. Pemilihan kualitatif didasarkan pada penelitian yang memfokuskan pada percakapan elite politik. Metode yang digunakan dalam pendekatan penelitian kualitatif ini adalah metode simak. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data melalui proses menyimak penggunaan bahasa lisan penutur (Sudaryanto, 2015). Jadi, untuk memenuhi kriteria validasi data maka teknik pengumpulan data menggunakan beberapa teknik sebagai turunan dari metode yang digunakan yaitu teknik sadap, teknik rekam, teknik simak, dan teknik catat.

Data diambil di kantor Legislatif Kota Makassar. Data penelitian ini berupa tuturan para elite politik. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah (1) perekaman (menjaring data percakapan) dan (2) wawancara (memperoleh data yang tidak terekam dengan HP dan yang tidak teramati atau tidak tercatat pada catatan lapangan saat pelaksanaan observasi). Dalam pelaksanaannya, peneliti menggunakan instrumen penunjang, yaitu (1) format panduan klasifikasi data, (2) format panduan catatan lapangan yang terdiri atas (a) catatan lapangan deskriptif dan (b) catatan lapangan reflektif, (3) format panduan wawancara, (4) format panduan analisis data, dan (5) HP digunakan untuk perekaman data penelitian.

Analisis data menggunakan model interaktif (Miles et al., 2014) yang meliputi tahap:

(1) pengumpulan data (2) reduksi data, (3) penyajian data, dan (4) verifikasi serta penarikan kesimpulan. Representasi dari model interaktif tergambar sebagai berikut. *Pertama*, data yang diperoleh diseleksi dengan cara memilih dan menentukan data mana yang diperlukan dan data mana yang tidak diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. *Kedua*, dilakukan penataan dan penyimpanan. *Ketiga*, data dianalisis secara kategoris yang mencakup identifikasi, klasifikasi, dan penyimpanan data yang berkaitan masalah penelitian untuk diinterpretasi dengan teori pragmatik yang digunakan. Validasi data penelitian dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, serta diskusi dengan teman sejawat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Ragam yang digunakan dalam komunikasi politik oleh anggota dewan berupa ragam lisan dan tulisan. Ragam lisan berupa percakapan tuturan elite politik saat mendengar aspirasi warga. Ragam tulisan saat pimpinan sidang membacakan hasil sidang. Tema sidang berupa dengar aspirasi warga berupa persoalan-persoalan di masyarakat. Situasi yang melatarbelakangi sidang yakni situasi yang ramah-tamah, marah, kecewa atau biasa. Hasil temuan terkait dengan bentuk pematuhan prinsip kerja sama dalam sidang dengar aspirasi warga di DPRD Kota Makassar dipaparkan menjadi dua kajian utama yaitu maksim relevansi dan maksim cara. Data tuturan anggota legislatif disajikan dan dinarasikan sesuai dengan konteks percakapan ataupun tuturan yang direlevansikan dengan teori dari maksim.

### Maksim Relevansi

Kajian penelitian pada maksim relevansi sesuai dengan latar sidang aspirasi antara anggota dewan dengan warga. Pada maksim relevansi, penutur memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah ataupun tajuk petuturan yang sedang terjadi.

#### Data 1.

Dewan 3 : pimpinan sidang, nama saya sukri hasan. Legislative GMTD, tatim harusnya hadir untuk menyampaikan, sehingga walikota harusnya menargetkan masukan hanya akan dibahas, menindak lanjuti.

Dewan 1 : ... kami mengundang kembali, karena kami belum tau progresnya, kami sebagai anggota dewan perwakilan rakyat (dengan nada sedikit keras)

Dari tuturan tersebut menunjukkan penyimpangan maksim relevansi. Lawan tutur menjelaskan hal yang tidak berhubungan dengan masalah yakni *kami sebagai anggota dewan perwakilan rakyat*. Padahal tanpa mengatakan seperti itu anggota sidang dan warga telah mengetahui para wakil rakyat. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa penutur memberikan pernyataan sebagai balasan pada pernyataan sebelumnya menyiratkan makna yang tersembunyi. Bahkan pernyataan dewan 3 terkesan menunjukkan emosi dan ketidaksukaan pada pernyataan dewan 3 atau ada unsur menghindari. Penutur dewan 1 tidak memberikan jawaban yang tepat sesuai konteks percakapan dan hal tersebut berdampak pada tidak tersampaikan pesan dari dewan 3.

Dari temuan konteks ini, dapat diketahui bahwa para dewan melakukan pertuturan yang tidak sesuai dengan konteks percakapan ataupun masalah yang akan dibahas. Dengan demikian, pernyataan dewan 1 ini menunjukkan adanya kebenaran yang disembunyikan dan tidak setuju. Jadi, pelanggaran maksim relevansi terjadi karena penutur memiliki alasan-alasan yang tidak ingin diketahui oleh penutur lain atau lawan bicara. Hal tersebut seperti yang telah dikaji pada penelitian Hernisa & Nurochman (2022) bahwa pelanggaran maksim relevansi dilakukan karena beberapa alasan penutur dan asumsi serta tujuan penutur yang berbeda dengan lawan bicara. Namun, pelanggaran maksim relevansi ini memberikan dampak negatif pada penutur atau lawan bicara. Walaupun demikian, pelanggaran maksim relevansi juga memberikan manfaat bagi penutur seperti menciptakan kesan positif, menghindari pemberian persetujuan pada isu yang ingin dibahas, menghindari serangan komentar negatif, menurunkan kredibilitas lawan bicara, menentukan kebenaran ataupun mengalahkan lawan bicara (Anindita, 2021; Kurniawan & Indriani, 2023).

### Maksim Cara

Maksim cara memiliki peran yang sangat penting dalam proses pertuturan yang terjadi di ruang sidang. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi ambigu pada pesan yang ingin disampaikan oleh setiap penutur. Berikut ini sejumlah maksim cara yang diungkapkan anggota DPRD ketika menerima atau memberi penjelasan kepada pemerintah atau masyarakat.

#### Data 2. Konteks Umum Sidang

Rapat dilaksanakan pada ruangan "Rapat Badan Anggaran" yang hadir oleh anggota Dewan Komisi B. Rapat berlangsung tenang

dan tertib. Sebelum rapat dimulai peserta rapat nampak bercanda satu sama lainnya sehingga suasana menjadi hangat. Rapat yang awalnya akan berlangsung pukul 10.00 Wita terlambat menjadi pukul 11.00 WITA, mundur 1 jam dari jadwal sebenarnya, hal tersebut karena anggota Dewan masih mengikuti rapat lainnya pada tempat yang berbeda. Akhirnya setelah lama menunggu rapat dimulai dengan dihadiri 6 orang anggota Dewan Komisi B. Pimpinan rapat membuka rapat dengan mangabsen peserta rapat terlebih dahulu.

Dewan 1 (ketua Komisi): Assalamualaikum Wr.Wb. terima kasih atas kedatangan Bapak-bapak dan mohon maaf atas keterlibatan acara kita. Saya kira yang diundang sudah hadir semua di ruangan ini walau ada yang mungkin mewakili. Melanjutkan pertemuan kita waktu yang lalu, kita akan mendiskusikan lagi dan kalau bisa hari ini ada solusinya. Untuk itu saya persilakan kepada warga untuk menyampaikan harapan-harapan terkait perkembangan terakhir. Silakan!

Warga1 : Terima kasih kepada anggota dewan yang memberikan kesempatan pada warga. Saya hanya mau menindak lanjuti rapat terakhir yang diwakili oleh RW dan RT. Saya hanya mau membacakan kesimpulan hasil rapat tersebut, biar anggota dewan tau sejauh mana kita melangkah.

Konteks percakapan yang terjadi pada rapat ini yang ditunjukkan oleh dewan 1 adalah ekspresi muka yang datar tanpa adanya kesan yang menari dari situasi sidang yang sedang terjadi. Dewan 1 membacakan simpulan hasil rapat warga dengan memegang catatan kecil ditangannya selama proses membuka sidang tersebut. Namun, tuturan anggota DPRD tersebut merupakan strategi penyampaian langsung kepada warga. Dengan bentuk imperatif untuk meminta serta strategi penyampaian seperti itu maka tuturan anggota DPRD (Dewan 1) terkesan langsung, lugas, jelas serta tidak berlebihan. Hal tersebut tampak pada tanggapan warga 1 yang menjawab dengan ucapan terima kasih atas perkenannya atau penjelasan (Dewan 1)

Data 2 menunjukkan bahwa penutur (warga 1) melakukan pelanggaran pada maksim cara, karena pernyataan yang diberikan belum sesuai dengan lawan bicara yaitu untuk menyampaikan harapan-harapan yang diinginkan. Namun, penutur (warga 1) menyampaikan

simpulan pada pertemuan sebelumnya. Jadi, ada kesan pernyataannya ambigu dan tidak runut. Walaupun maksud dari penutur (warga 1) adalah berakhir pada menyampaikan harapan mereka. Namun, proses percakapan ini jadi tidak fokus pada permasalahan yang ingin dibahas secara runut.

### Data 3

Dewan 1 : Boleh tau tanggal berapa (dengan kepala mengangguk-angguk seolah-olah masih belum nampak jelas penjelasan dari warga, dengan tangan yang menunjuk sambil digerakkan perlahan ke warga)

Warga 1 : ..... kami dari warga ingin mengetahui bagaimana merealisasikan yang kami sudah rapatkan.

Data 3 menunjukkan ada pertanyaan yang bertujuan untuk mengetahui keinginan masyarakat dan terlihat pada potongan kalimat ini "Boleh tahu tanggal berapa ..." Tuturan anggota DPRD tersebut merupakan strategi penyampaian langsung kepada warga. Dengan bentuk dan fungsi serta strategi penyampaian seperti itu maka tuturan anggota DPRD (Dewan 1) terkesan langsung, lugas, jelas serta tidak berlebihan. Hal tersebut tampak pada tanggapan warga (w1) yang merasa puas atas penjelasan (Dewan 1). Jadi pada pernyataan ini tidak menunjukkan pelanggaran maksim cara karena pernyataan yang diberikan lugas sesuai dengan konteksnya dan lawan bicara juga menanggapinya dengan jelas.

### Data 4.

Dewan 1 : Saya serahkan kepada pihak GMTD atau pengembang untuk menjawab atau menyanggah hal tersebut. (Dengan visualisasi tangan menunjukkan kepada pihak terkait)

Warga 2 : Pihak masyarakat/warga dimohon bersabar kami hanya butuh waktu untuk merumuskan, supaya tidak menjadi beban untuk kami, kita tidak mau menahan terlalu lama. Kami sudah mencari..... kami pernah meminta tanda tangan 75% ..... tidak sampai 75%. Ini menjadi bake up kita, jangan sampai menjadi tuntutan.....

Dewan 2 : Sementara proses yang disepakati belum ada. Kemudian tentang waktunya belum ada. .... mungkin komunikasinya yang kurang, kami dari komunikasi B hanya menginginkan komunikasi diperbaiki.

Data 4 menunjukkan konteks percakapan adalah sanggahan pernyataan lawan bicara. Ada

sanggahan yang diberikan oleh anggota dewan secara langsung kepada warga. Bahwa ekspresi anggota dewan memperlihatkan seolah-olah para anggota dewan tidak menerima penjelasannya dengan sedikit tertawa kecil seolah-olah memberikan gambaran mengejek sanggahan dari pihak terkait. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan dewan 1 dan dewan 2 yang bertujuan agar warga 2 bisa mengetahui maksud dari anggota dewan 1 dan 2. Tuturan anggota DPRD tersebut merupakan strategi penyampaian langsung kepada warga. Dengan bentuk dan fungsi serta strategi penyampaian seperti itu maka tuturan anggota DPRD (Dewan) terkesan langsung, lugas, jelas serta tidak berlebihan. Hal tersebut tampak pada tanggapan warga (2) yang merasa puas atas penjelasan (Dewan 1 dan Dewan 2) seperti dan percakapan di atas.

Data 4 juga menunjukkan adanya penyimpangan cara dari anggota dewan yang dilihat dari ekspresi wajah mereka terhadap pernyataan warga. Hal ini memberikan kesan tuturan dan sikap anggota dewan tidak memiliki tata krama atau kesopanan. Walaupun anggota dewan memberikan pernyataan langsung tetapi pernyataan ini dilengkapi dengan sikap yang kurang sopan. Mereka seharusnya tidak perlu menunjukkan ekspresi wajah tidak menyukai pernyataan warga. Dengan demikian, penutur menunjukkan maksud tidak langsung karena adanya ekspresi wajah tersembunyi. Hal ini bisa menimbulkan persepsi kata yang ambigu dan pesan yang tidak dapat dipahami oleh lawan bicara (Komorowska, 2021).

#### Data 5.

Warga 3 : Pimpinan sidang, nama saya Sukri Hasan. Legislative GMTD, Tatim harusnya hadir untuk menyampaikan, sehingga walikota harusnya menargetkan masukan hanya akan dibahas, menindak lanjuti.

Dewan 1 : ... kami mengundang kembali, karena kami belum tau progresnya, kami sebagai anggota dewan perwakilan rakyat. (dengan nada sedikit keras)

Data 5 menunjukkan konteks percakapan yang diselubungi rasa kecewa dari warga terhadap pihak pemerintah kota yang menghadiri acara persidangan. Pernyataan Dewan 1 atas keluhan Warga 3 merupakan bentuk pernyataan untuk menyatakan janji kepada Warga 3 (masyarakat) agar pertemuan berikutnya pihak pemerintah kota bisa dihadirkan. Tuturan anggota DPRD tersebut merupakan strategi penyampaian langsung kepada warga. Dengan bentuk dan fungsi serta strategi

penyampaian seperti itu maka tuturan anggota DPRD (Dewan) terkesan langsung, lugas, jelas serta tidak berlebihan.

#### Data 6.

Warga 2 : Mungkin gini Pak, saya tidak mau terlalu lama, nanti langsung saja, mungkin di depan kita haruskan ..... itu dibentuk, hasil dari pertemuan ..... maaf pak ketua 75% kami akan menyerahkan, dan karena ini .... Yang diserahkan maka kami harus back up Pak (warga menyanggah dengan ekspresi agak tegang)

Dewan 1 : Jadi bagaimana Pak di dalam nilai DPR itu tentang perbaikan lingkungan karena dalam ...akan ada suatu .....tidak yang serahkan kepada warga mungkin tidak ada intervensi

Warga 5 : Pengelolaan barang terkait dengan.....daerah mungkin banyak SKPD. Kami sepakat dengan warga untuk dipercepat. .... Di dinas perumahan sebenarnya dalam hal ini hanya di dinas pertanahan.

Data 6 menunjukkan konteks bahwa warga atau masyarakat tampak menekan anggota dewan agar menekan pihak GMTD. Jadi, pertanyaan dewan 1 terhadap dan warga 2 dan 5 merupakan bentuk pertanyaan untuk dijawab oleh warga 2 dan 5 (masyarakat). Tuturan anggota DPRD tersebut merupakan strategi penyampaian langsung kepada warga. Dengan bentuk dan fungsi serta strategi penyampaian seperti itu maka tuturan anggota DPRD (Dewan 1) terkesan langsung, lugas, jelas serta tidak berlebihan. Hal tersebut tampak pada tanggapan warga (warga 5) yang merasa puas atas penjelasan (Dw 1) seperti dan percakapan di atas. Namun ada kesan makna yang ambigu tanggapan dewan kepada warga, sehingga ada pelanggaran maksim cara yang disampaikan oleh dewan.

#### Data 7.

Dewan 4 : Jangan bicara mungkin Bu! Langsung saja bagaimana?

Warga 1 : Pihak GMTD....(tampak patuh)

DW 1 : Jadi bagaimana Pak seharusnya pihak perumahan jangan menunggu harusnya pihak GMTD menyerahkan hal terkait yang didakwakan setelah dari sini. Kami akan mengadakan rapat kecil untuk membahas hal ini. Serta kami akan mengeluarkan rekomendasi tiga hari dari sekarang. Insya Allah akan mengajukan rekomendasi dari pihak kami. Mungkin itu, terim kasih atas kehadiran kita semua. Wassalamu alaikum Wr.Wb.

Data 7 menunjukkan konteks percakapan tentang keinginan anggota dewan pada peserta sidang (ibu-ibu) tidak ribut agar rapat berlangsung dengan tertib suasana rapat yang tenang, sembari mempersilakan pihak GMTD berbicara. Jadi, tuturan anggota dewan (4) merupakan perintah terhadap warga (W1). Tuturan dewan 4 merupakan bentuk imperatif untuk memerintah warga 1 (masyarakat). Tuturan anggota DPRD tersebut merupakan strategi penyampaian langsung kepada warga. Dengan bentuk dan fungsi serta strategi penyampaian seperti itu maka tuturan anggota DPRD (Dewan 1) terkesan langsung, lugas, jelas serta tidak berlebihan. Hal tersebut tampak pada tanggapan warga (1).

Dari 6 data yang telah dianalisis menunjukkan ada 50% pelanggaran maksim cara. Hal ini terlihat dari sikap seseorang dalam menanggapi pernyataan lawan bicara dan pernyataan yang ambigu terhadap balasan pernyataan penutur. Padahal setiap tuturan seharusnya bisa memberikan nilai kebenaran tanpa adanya keraguan. Dari paparan data menunjukkan setiap penutur menunjukkan adanya pengaturan tuturan atau informasi yang ingin didiskusikan bersama agar relevan dengan konteks sidang (Mohamad et al., 2022). Pelanggaran maksim cara menimbulkan komunikasi tidak lancar dan para pendengar atau lawan bicara bisa memberikan persepsi yang salah terhadap makna yang ingin diberikan penutur. Pelanggaran ini tidak hanya muncul dari pernyataan yang tidak lugas, akan tetapi kesopanan bisa memberikan kesan pada pelanggaran maksim cara ini (Rahayu & Harjono, 2016). Hasil penelitian ini menyiratkan bagaimana orang harus mempertimbangkan untuk memenuhi prinsip kerja sama agar berhasil dalam komunikasi yang terutama didasarkan pada teori implikatur Paul Grice yang dianggap sebagai salah satu kontribusi paling penting untuk pragmatik (Md. Mahroof Hossain, 2021).

## PENUTUP

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ada satu data pelanggaran maksim relevansi dan tiga data pelanggaran maksim cara. Maksim tutur yang tidak dipatuhi terkait prinsip kerja sama didominasi dengan maksim cara. Pelanggaran maksim relevan yang ditimbulkan dari data menunjukkan kesan pesan atau makna yang ingin disembunyikan. Dengan kata lain bahwa ada kebenaran yang ingin ditutupi karena penutur menunjukkan sikap emosi ataupun ketidaksukaan terhadap tuturan lawan bicara. Sedangkan pelanggaran maksim cara muncul disebabkan adanya tanggapan lawan bicara yang ambigu dan

adanya sikap yang tidak menunjukkan kesopanan terhadap pernyataan penutur. Hal ini juga memberikan kesan bahwa tuturan yang diberikan seharusnya memiliki keseimbangan antara makna yang ingin disampaikan dengan *body language* yang mengarah pada etika dan kesopanan. Hasil penelitian ini berimplikasi pada pemahaman konteks prinsip kerjasama dalam tuturan. Setiap proses komunikasi harus dilakukan dengan jelas dan lugas tanpa adanya makna pesan yang tersembunyi. Hasil penelitian ini masih terbatas pada analisis maksim relevansi dan cara yang diambil dari tutur lisan dalam sidang di ruang DPRD Kota Makassar. Selain itu, data yang diperoleh juga masih terbatas. Dengan demikian, peneliti selanjutnya masih bisa mengembangkan hasil penelitian ini tentang keterkaitan pelanggaran maksim dengan kesopanan dalam berbicara ataupun *politeness strategy* agar kajian bisa menjadi lebih berkembang. Peneliti selanjutnya juga bisa memperhatikan tentang jumlah data dan bisa mengambil beberapa situasi persidangan agar data lebih kaya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anindita, R. (2021). FLOUTING MAXIM OF RELEVANCE IN SITUATIONAL COMEDY MALAM MINGGU MIKO 2. *Journal of Language and Literature*, 8(2), 114–122. <https://doi.org/10.35760/JLL.2020.V8I2.2962>
- Aziz, Z. A., Mustafa, F., & A'la, P. N. (2019). Flouting Maxims as a Sense of Humor in Indonesian Speech Acts. *Indonesian Journal of EFL and Linguistics*, 4(2), 169. <https://doi.org/10.21462/IJEFL.V4I2.156>
- Chaer, A. (2010). *Kesantunan Berbahasa*. Rineka Cipta.
- Djajasudarma, F. (2012). *Wacana & Pragmatik*. Refika Aditama.
- Firda, I. N., Hidayat, D. N., Alek, A., & Nurhalimah, N. (2021). An Analysis of Flouting Maxim in a Talk Show Program in Indonesia. *Eduvelop: Journal of English Education and Development*, 4(2), 107–118. <https://doi.org/10.31605/EDUVELOP.V4I2.887>
- Firda, I. N., Hidayat, N., & Alek, N. (2020). The analysis of flouting maxim in Good Morning America (GMA) talkshow. *Englisia: Journal of Language, Education, and Humanities*, 7(2), 132–142. <https://doi.org/10.22373/EJ.V7I2.6630>
- Gustary, D. T., & Anggraini, S. (2021). The Analysis of Flouting Maxim in "UP!" Movie. *Jurnal Lingua Idea*, 12(2), 124–135. <https://doi.org/10.20884/1.JLI.2021.12.2.4118>
- Hernisa, S., & Nurochman. (2022). Relevance Maxim Violation in 'The Falcon and The Winter Soldier' Episode 1. *International Journal of Linguistics, Literature and Translation*, 5(1), 80–87. <https://doi.org/10.32996/IJLLT.2022.5.1.11>

- Jafari, J. (2013). The pragmatic analysis of Wilde's comedy: The importance of being earnest. *Theory and Practice in Language Studies*, 3(12), 2151–2156.  
<https://doi.org/10.4304/TPLS.3.12.2151-2156>
- Julianto, C. D. (2016). REPRESENTASI PENGGUNAAN PRINSIP KERJASAMA GRICE PADA ACARA TALK SHOW "APA KABAR INDONESIA" DI TV ONE 24 DESEMBER 2014. *Deiksis Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 3(1).  
<http://www.fkip-unswagati.ac.id/ejournal/index.php/deiksis/article/view/228>
- Kheirabadi, R., & Aghagolzadeh, F. (2012). Grice's cooperative maxims as linguistic criteria for news selectivity. *Theory and Practice in Language Studies*, 2(3), 547–553.  
<https://doi.org/10.4304/TPLS.2.3.547-553>
- Komorowska, E. (2021). Language communication in a pragmatic perspective: Flouting the cooperative principle. *Beyond Philology An International Journal of Linguistics, Literary Studies and English Language Teaching*, 17(2), 27–49.  
<https://doi.org/10.26881/BP.2020.2.02>
- Kurniawan, A. B., & Indriani, L. (2023). Flouting Relevance Maxim Benefits of Hillary Clinton's President Candidate Debate on 2016. *Journal of Pragmatics Research*, 5(2), 135–152.  
<https://doi.org/10.18326/JOPR.V5I2.135-152>
- Marlisa, R., & Hidayat, D. N. (2020). THE ANALYSIS OF FLOUTING MAXIM IN GOOD MORNING AMERICA (GMA) TALKSHOW. *Englisia: Journal of Language, Education, and Humanities*, 7(2), 137.  
<https://doi.org/10.22373/EJ.V7I2.6630>
- Md. Mahroof Hossain. (2021). The Application of Grice Maxims in Conversation: A Pragmatic Study. *Journal of English Language Teaching and Applied Linguistics*, 3(10), 32–40.  
<https://doi.org/10.32996/JELTAL.2021.3.10.4>
- Melalota, M. J. (1995). *Ensiklopedia Suku bangsa di Indonesia*. CV Eka Putra.
- Miles, M., Huberman, A., & Saldaña, J. (2014). Sampling: Bounding the collection of data. In *Qualitative Data Analysis: A methods Sourcebook*. SAGE.
- Mohamad, A. R., Sahril, & Iskandar. (2022). The Study of Gricean Maxim Hedging in Noam Chomsky's Online Lectures. *Pinisi Journal Of Art, Humanity And Social Studies*, 2(4), 60–66.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Rosdakarya.
- Pawito, P., Muktiyo, W., & Arifin, H. (2020). Nilai Budaya dan Gaya Komunikasi Warga Minangkabau, Jawa, dan Bugis. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 17(3), 249–261.  
<https://doi.org/10.31315/JIK.V17I3.3775>
- Putrayasa, I. B. (2021). Political Language Variation: Stylistic Based Study. *Linguistics and Culture Review*, 5(1), 1–9.  
<https://doi.org/10.37028/lingcure.v5n1.45>
- Rahayu, E. P., & Harjono, H. S. (2016). MAKSIM CARA BAHASA JAWA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR PELITA SK 17 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR. *Pena*, 6(2), 1–15.
- Sudaryanto. (2015). *Metode dan Teknik Analisis Bahasa*. Sanata Dharma University Press.
- Sugono, D. (2014). *Peran dan Kekuatan Bahasa Indonesia Dalam Industri Kreatif Kebahasaan*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Widjaja. (2010). *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Bumi Aksara.
- Yule, G. (2016). *The Study of Language (Sixth Edit)*. Cambridge University Press.